

Edisi:

#03

September, 2016

PENGANGGARAN HIJAU NEWSLETTER

Memasukkan aspek lingkungan ke dalam proses penganggaran.

Tentang Edisi Ini

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) berupaya untuk mendorong efektivitas implementasi penganggaran hijau (green budgeting)—salah satu ujung tombak bagi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Untuk memenuhi target penurunan emisi karbon sebesar 26% hingga akhir tahun 2020, LPEM FEB UI dan MCAI meneruskan langkahnya dalam implementasi penganggaran hijau di Indonesia. Hingga September 2016, LPEM telah menyelenggarakan diskusi bersama para pemangku kepentingan, pelatihan untuk para pelaksana implementasi, serta penulisan studi kasus di empat provinsi di Indonesia.

Diskusi bersama para pemangku kepentingan dilakukan dalam bentuk MSF (*Multi Stakeholder Forum*). Melalui MSF, LPEM menyampaikan penemuan dari penelitiannya serta menggali saran dari para peserta. Di halaman selanjutnya, Anda dapat membaca rangkuman dari hasil diskusi dari MSF yang telah diselenggarakan sampai dengan kuartar ketiga 2016.

ToT (*Training of Trainer*) merupakan pelatihan yang diberikan oleh LPEM mengenai materi yang dapat membantu

implementasi penganggaran hijau. Pelatihan ini diberikan pada Pemerintah Daerah selaku pihak yang melaksanakan kegiatan penganggaran hijau secara langsung. Di edisi ini, Anda akan dapat melihat beberapa materi yang telah disusun oleh tim LPEM dalam ToT.

Agenda terakhir yang telah dilaksanakan oleh LPEM adalah TA (*Technical Assistance*). Di TA, tim peneliti terjun langsung ke lapangan untuk membuat studi kasus terkait implementasi penganggaran hijau. Di edisi ini, Anda dapat melihat permasalahan apa yang ditemukan oleh tim peneliti di tiap-tiap provinsi yang menjadi sampel penelitian, yaitu Jambi, NTB, NTT, dan Sulawesi Barat.

Selamat membaca,

Tim Peneliti

Mengungkap Permasalahan *Stakeholder* pada Implementasi Penganggaran Hijau

Salah satu agenda LPEM dalam melaksanakan program penganggaran hijau adalah MSF (*Multi Stakeholder Forum*). MSF mempertemukan berbagai pihak yang keterlibatannya krusial untuk kesuksesan penganggaran hijau, termasuk pihak Pemerintah Pusat (RAN-GRK dan Kementerian) serta Pemerintah Daerah. Dari hasil diskusi bersama para pemangku kepentingan tersebut, terungkaplah beberapa permasalahan yang dihadapi dalam aksi menyukseskan penganggaran hijau.

Salah satu masalah yang diajukan oleh pihak kementerian adalah adanya kemungkinan perbedaan tujuan antara kementerian satu dengan yang lain. Setiap kementerian pasti memiliki agenda tersendiri yang belum tentu bertujuan mengurangi emisi karbon, meskipun mungkin bisa beririsan.

Untuk itu, perlu ada koordinasi di pihak kementerian untuk menyamakan agenda dalam upaya menurunkan emisi karbon. Pendekatan yang sesuai juga perlu dicari supaya tidak ada persepsi bahwa agenda penurunan iklim hanyalah sekedar beban tambahan. Jika memungkinkan, salah satu kementerian dapat ditunjuk untuk menjadi pemimpin program. Kementerian Keuangan secara khusus menjelaskan pentingnya kejelasan tujuan kegiatan dalam penentuan anggaran, agar dana yang diperlukan untuk keperluan implementasi penganggaran hijau dapat disediakan dengan lancar.

Sementara itu, diskusi dengan Pemerintah Daerah lebih banyak membahas mengenai indikator yang akan dipakai untuk mengukur efektivitas pelaksanaan penganggaran hijau. Ini karena Pemerintah Daerah adalah pihak yang akan mengimplementasi kebijakan-kebijakan penganggaran hijau secara langsung. Secara umum, Pemerintah Daerah

di seluruh area penelitian setuju bahwa indikator yang akan dipakai harus 1) dapat menghubungkan *green policy*, *green planning*, dan *budgeting policy*, 2) sesuai dengan program dan kegiatan RAD-GRK di masing-masing daerah, dan 3) merefleksikan komitmen Pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi emisi karbon.

Pemerintah Daerah juga mengungkapkan beberapa masalah yang mereka hadapi di daerah masing-masing. Misalnya NTT, yang karena kondisi daerahnya relatif kurang berkembang dibanding yang lain, masih harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, petani NTT belum bisa mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan karena dikhawatirkan mengurangi hasil produksi.

Tantangan lain yang dihadapi oleh seluruh provinsi adalah masalah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota misalnya, sulit menentukan anggaran penganggaran hijau karena ada beberapa dinas yang kewenangannya sudah dipindah ke level provinsi, seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Energi dan Pertambangan.

Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, dibuatlah rencana dan tindak lanjut dari diskusi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus sama-sama berupaya berkoordinasi, terutama dari segi hukum dan regulasi. Pemerintah Pusat diharapkan dapat menemukan pendekatan yang dapat menginsentif Pemerintah Daerah untuk lebih terlibat dalam penganggaran hijau. Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat dan mengimplementasi aksi penganggaran hijau yang konkrit dan berkualitas. Dengan begitu, program implementasi penganggaran hijau akan berjalan tanpa kendala yang berarti. ■



Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penganggaran Hijau

Ke depan, yang akan menentukan kesuksesan implementasi penganggaran hijau adalah Pemerintah Daerah sebagai pelaksana langsung dari program-program yang ada. Karena itu, LPEM mulai bergerak untuk memberikan dukungan bagi Pemerintah Daerah dengan menyelenggarakan ToT (*Training of Trainer*). Tujuan ToT adalah untuk menyebarkan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan tentang penganggaran hijau dan meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk membuat perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan aspek perubahan iklim.

Untuk dapat mengimplementasikan penganggaran hijau dengan efektif, ada sembilan aspek yang harus dipahami oleh para pemangku kepentingan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

Hubungan perencanaan nasional dan daerah dengan perubahan iklim

Ekonomi hijau merupakan masalah bersama, dengan strategi dan target yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah. Karenanya, pelaksanaan ekonomi hijau harus memahami hubungan dan cara koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan daerah dan lintas sektor.

Indikator dan pengukuran pencapaian penanganan perubahan iklim

Indikator diperlukan untuk mengukur pencapaian dari implementasi penganggaran hijau. Indikator dapat berbeda-beda sesuai dengan sektor dan setiap daerah juga akan memiliki sektor yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik daerahnya. Sektor penganggaran hijau saat ini dibagi menjadi tiga, yaitu 1) Sektor Berbasis Lahan, 2) Sektor Berbasis Energi (Transportasi, Industri, dan Energi Terbarukan), dan 3) Sektor Limbah.

Perencanaan dan penganggaran di Indonesia

Perencanaan penganggaran hijau bermula dari Pemerintah Pusat dengan dibentuknya RAN-GRK. Selanjutnya, dibuatlah PP nomor 61 tahun 2011 yang mengamanatkan pembentukan RAD-GRK untuk level provinsi. Namun, untuk memastikan agar implementasi penganggaran hijau di tingkat daerah lebih efektif, maka kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu diperhitungkan di dalam RAD-GRK.

Sumber-sumber pembiayaan penanganan perubahan iklim

Pemangku kepentingan dari implementasi penganggaran hijau harus mengetahui dari mana sumber dana untuk menjalankan program didapatkan. Secara garis besar, Pemerintah Daerah selaku pihak yang mengimplementasi dapat memperoleh dana dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Cost benefit analysis dan cost effectiveness

Agar program yang dijalankan tidak sia-sia, pihak pelaksana perlu memahami cara menganalisis apakah suatu kegiatan layak dilakukan atau tidak. Analisis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *cost benefit analysis* dan *cost effectiveness*.

Program-program perubahan iklim di tingkat nasional dan daerah

Sebelum RAN-GRK dibentuk, sudah ada upaya individual dari berbagai kementerian maupun pemerintah daerah untuk menyelamatkan lingkungan. Pemangku kepentingan dapat mengambil pelajaran dari proyek-proyek yang telah dilakukan sebelumnya untuk membentuk rencana yang lebih berkualitas. ■

Studi Kasus Penganggaran Hijau di Empat Provinsi

Setiap rencana harus diikuti dengan aksi. Itulah yang dilakukan oleh tim peneliti LPEM FEB UI dengan melaksanakan TA (*Technical Assistance*). TA memiliki dua tujuan besar, yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah dalam membuat perencanaan dan penganggaran yang menginternalisasi aspek perubahan iklim dan mengaplikasikan materi yang telah diperoleh di ToT Penganggaran Hijau, khususnya yang berhubungan dengan ruang lingkup dinas dari tim TA.

TA dilaksanakan di empat provinsi di Indonesia, yaitu Jambi, NTB, NTT, dan Sulawesi Barat. Masing-masing daerah memiliki karakteristiknya geografis dan sosialnya masing-masing. Berikut ini adalah permasalahan yang ditemukan oleh tim peneliti di tiap-tiap provinsi.

Jambi

Masalah yang penting dan mendesak di Jambi adalah kebakaran hutan. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi saat ini berada di kategori sangat berbahaya. Efek lain dari kebakaran hutan adalah kebakaran lahan gambut, meningkatnya penderita Infeksi Saluran Pernapasan, turunnya jarak pandang, tanaman tidak berbuah, serta punahnya puluhan spesies anggrek.

Terkait dengan masalah ini, tim peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2) Program rehabilitasi lahan gambut di kawasan lindung, 3) Upaya pemadaman kebakaran hutan, 4) Patroli hutan, 5) Upaya pembukaan lahan tanpa bakar, dan 6) pembuatan sekat kanal.

NTB

Kondisi lingkungan hidup di NTB saat ini mengalami penurunan kualitas, ditandai dengan degradasi dan kerusakan ekosistem, krisis air bersih, pencemaran air, dan keterbatasan energi. Tim peneliti melihat peluang untuk membantu menyelamatkan lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber energi baru terbarukan, khususnya dengan tenaga air.

Tim peneliti telah mendata program yang tersedia untuk

dikembangkan beserta alternatif yang bisa diambil untuk langkah selanjutnya, yaitu: 1) Peningkatan Produksi listrik PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), 2) Pengembangan jaringan listrik di wilayah terpencil, 3) Kolaborasi dengan para pihak terkait untuk mendukung pelestarian sumber daya alam, 4) Pembentukan kelembagaan pengelola PLTMH, 5) Pendokumentasian kearifan lokal, serta 6) Penyusunan regulasi terkait.

NTT

NTT berbeda dengan daerah lain karena bentang alamnya yang mayoritas berupa sabana dan stepa. Lahan-lahan ini banyak yang menjadi lahan tidur dan marginal yang belum tersentuh. Akibatnya, NTT saat ini menghadapi masalah berupa besarnya area yang menjadi lahan kritis. Total luas lahan kritis di Kabupaten Sumba Tengah adalah 104.308 hektar.

Terkait masalah ini, tim peneliti akan mengkaji program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan, optimalisasi lahan tidur untuk menanam HMT (Hijauan Makanan Ternak), dan pemanfaatan air bawah tanah dengan sistem fotovoltaker.

Sulawesi Barat

Indeks kualitas lingkungan hidup menurun ditandai dengan meningkatnya pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran berasal dari sampah dan limbah yang belum diolah sebelum dibuang dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya lingkungan. Masalah ini diperparah dengan kurangnya fasilitas pembuangan dan pengolahan sampah yang memadai dari Pemerintah.

Tim peneliti telah mendata program yang tersedia untuk dikembangkan beserta alternatif yang bisa diambil untuk langkah selanjutnya, yaitu menyarankan untuk memprioritaskan minimalisasi sampah, pemilahan sampah, serta menerapkan aturan untuk industri supaya mendesain ulang produk sehingga mudah didaur ulang. ■



Contact Person:

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat.

Telp. (021) 314-3177 Fax. (021) 319-343-10

Email: penganggaranhijau@pem-feui.org | riatu.mariatul@ui.ac.id
penganggaranhijau@gmail.com

Tim Peneliti:

Riatu M. Qibtiyyah, Alvin Ulido Umbanraja,
Andhika Putra Pratama, Cita Wigioseptina,
Devina Anindita, Farma Mangunsong, Ledi
Trialdi, Lili Yunita, Nia Kurnia, Sulistiadi Dono
Iskandar

Editor dan Desain: Yuanita Intan